BAB VI

PEMBERDAYAAN KELUARGA

SATU WINDU BERBAKTI MELALUI PEMBERDAYAAN KELUARGA

Tepatnya tanggal 15 Januari 2004 lalu, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, atau terkenal dengan nama Yayasan Damandiri, berusia delapan tahun. Selama masa satu windu, atau delapan tahun itu, Yayasan Damandiri dengan cara sederhana, telah berusaha ikut membantu upaya pembangunan dan pemberdayaan keluarga.

Dukungan itu adalah dalam rangka melanjutkan kerja besar yang selama ini telah dilakukan melalui berbagai upaya pembangunan dan pemberdayaan keluarga sejak kita memproklamirkan kemerdekaan di tahun 1945. Upaya besar itu umumnya dilakukan melalui berbagai program pembangunan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri.

Mulai tahun 1970 upaya besar itu ditambah dengan program keluarga berencana. Pelaksanaan Program KB itu, sebagai upaya pemberdayaan keluarga, diselenggarakan dengan tujuan agar setiap keluarga mencapai kondisi bahagia dan sejahtera, dilakukan secara bertahap, sistematis dan dengan landasan hukum, peraturan pemerintah dan berbagai keputusan yang kuat, yaitu keputusan MPR, Presiden, Menteri dan berbagai Keputusan

Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota dan atau pejabat lainnya.

Pelaksanaan Program itu mendapat dukungan komitmen yang sangat kuat dari Presiden dan seluruh jajaran pemerintah. Dukungan juga datang dari berbagai lembaga masyarakat, pemimpin formal, alim ulama dan pemimpin informal lain dengan komitmen yang sangat tinggi.

Sebagai bagian dari pemberdayaan keluarga, program KB itu diikuti partisipasi masyarakat yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Hasil-hasilnya sungguh sangat menakjubkan. Peserta KB yang semula bertambah dengan pelahan, hanya sekitar 180.000 peserta selama satu tahun, pada periode lima tahun kedua setiap tahunnya berhasil diajak tidak kurang dari 5.000.000 peserta baru yang bergabung.

Penerimaan KB semakin lama semakin marak dan akhirnya gerakan KB diikuti oleh peserta dengan jumlah yang mengagumkan, diluar kemampuan institusi formal yang ada untuk melayaninya. Akhirnya dicapai kata sepakat bahwa berbagai lembaga, termasuk lembaga swasta dan perorangan diijinkan membantu pelaksanaan pelayanan terhadap partisipasi yang tinggi itu di lapangan, baik untuk pelayanan informasi maupun pelayanan kontrasepsi dan penanganan masalah lain yang terkait.

Dengan dukungan komitmen yang begitu tinggi, para peserta KB bergabung dalam kelompok untuk memperbesar silaturahmi dan kerjasama antar sesama. Dalam kelompoknya para peserta KB tidak saja mengelola kebutuhan pelayanan KB bersama-sama, tetapi juga mengembangkan program lain yang bisa memperkuat pemberdayaan keluarga, termasuk program dukungan untuk pemberdayaan ekonomi produktif dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekelilingnya.

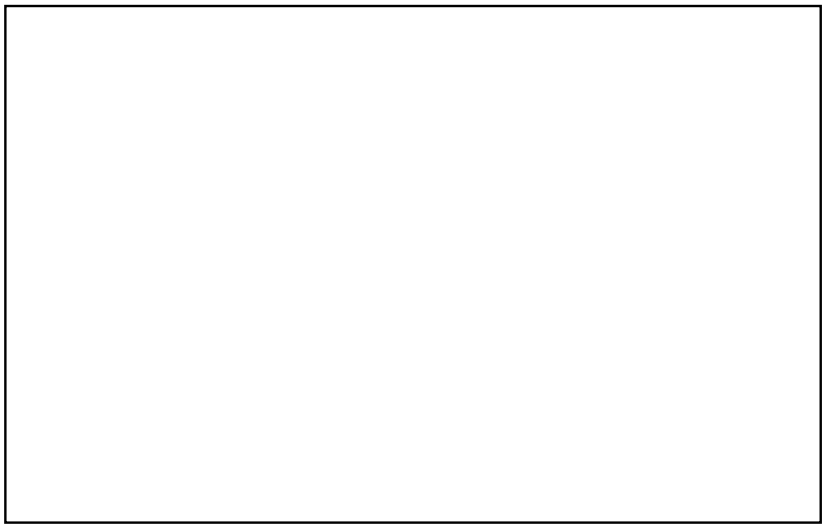

Untuk melembagakan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, semangat para peserta KB itu disambut baik oleh pemerintah dengan memberi kesempatan dengan insentif kepada kelompok yang berhasil berupa. Dukungan itu disesuaikan dengan keadaan kelompok, anggota dan desanya. Kelompok di daerah yang ingin membantu anggotanya dengan kegiatan ekonomi dibantu dengan dukungan dana pemberdayaan ekonomi produktif dan fasilitas pendukung lainnya.

Karena jumlah kelompok yang banyak, dan kemampuan pemerintah terbatas, maka pada tahun 1993 digagas pembentukan Yayasan untuk keperluan ini oleh Bapak HM Soeharto, pada waktu itu masih sebagai Presiden RI. Gagasan itu mendapat sambutan masyarakat luas dan pada tanggal 15 Januari 1996 ditetapkan pembentukan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri atau disingkat Yayasan Damandiri. Tujuannya adalah untuk

membantu pemerintah dalam upaya pemberdayaan keluarga agar segera terwujud membudayanya norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Upaya itu sekaligus dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga, pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan upaya-upaya usaha ekonomi mikro yang dapat diikuti melalui partisipasi yang tinggi oleh masyarakat luas, khususnya keluarga kurang mampu, atau keluarga miskin, atau keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, atau keluarga lain yang sedang tumbuh dengan mengembangkan usaha ekonomi mikro produktif.

Pada saat yang hampir bersamaan, sekitar tahun 1997 – 1998 bangsa Indonesia mengalami gangguan krisis ekonomi yang parah dan berkelanjutan sampai sekarang. Upaya pemberdayaan keluarga melalui pemberdayaan langsung kepada anggotanya, terutama kepada kaum ibu dalam keluarga mengalami gangguan. Namun upaya yang baru dilaksanakan berupa dukungan dana dari Yayasan Damandiri untuk belajar menabung melalui program yang dilaksanakan bersama dengan Bank BNI, PT Posindo dan berbagai kalangan lain dalam tabungan Takesra tetap diteruskan. Para penabung, yang tergabung dalam kelompok KB, diberi kesempatan mengambil kredit murah Kukesra.

Biarpun lamban karena gangguan ekonomi yang dialami bangsa kita, dapat dicatat bahwa sampai awal tahun 2002 ada lebih dari 13,6 juta keluarga telah berhasil menjadi penabung yang baik. Jumlah tabungan mereka pernah mencapai Rp 250 milyar. Dari jumlah tersebut, dengan agunan tabungan masing-masing, lebih 10,4 juta keluarga menikmati latihan mempergunakan kredit murah yang didukung oleh Yayasan Damandiri sebagai modal untuk usaha kegiatan ekonomi produktif. Jumlah kumulatif pinjaman kredit pernah

mencapai Rp 1,7 trilliun.

Pada awal era reformasi sempat dikembangkan usaha Kukesra secara mandiri atau Kukesra Mandiri. Namun, kembali lagi usaha itu mandeg karena berbagai alasan. Pemerintah disatu pihak kurang memberikan dukungan untuk pembinaan dan pengembangannya dan pihak swasta, khususnya Yayasan Damandiri, tidak lagi dalam posisi untuk mampu memberikan dukungan yang diperlukan secara besar-besaran. Para peserta dan pembina Kukesra Mandiri dianjurkan untuk menyalurkan para nasabahnya kepada Bank-bank yang menyalurkan dana dari Yayasan Damandiri dengan sistem *executing* seperti yang dianut pemerintah pada saat ini. Bunga dari program-program yang ditawarkan juga makin kecil dengan sistem yang makin mudah diakses oleh para peserta dari kalangan keluarga kurang mampu yang mulai dengan usaha ekonomi produktif.

Dengan pengalaman dan alasan itu, untuk masa yang akan datang, Yayasan Damandiri, biarpun dalam program yang relatif lebih kecil dan sederhana, akan tetap melanjutkan bantuannya dalam upaya pemberdayaan keluarga, terutama ditujukan kepada keluarga kurang mampu, melalui upaya pemberdayaan anak perempuan dan kaum ibu dalam lingkungan keluarga, sebagai upaya pemberdayaan, atau sebagai upaya memotong rantai kemiskinan, dengan program-program yang diselenggarakan sesuai dengan perkembangan daerah, kelompok atau perorangan yang terlibat, antara lain melalui upaya-upaya tersebut dibawah ini :

Kredit Pundi dan Pundi Kencana

Skim ini disediakan melalui Bank-bank Pembangunan Daerah di propinsi-propinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB,

NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kredit PUNDI ini juga disediakan melalui Bank Bukopin pada cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.

Selain itu kredit PUNDI ini juga disediakan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba di 20 kabupaten di seluruh Jawa dan Bali, BPR Artha Huda Abadi di Pati, dan BPR YIS di Solo. Kredit PUNDI ini diberikan dengan bunga pasar disertai dengan berbagai kemudahan seperti insentip bagi mereka yang membayar secara teratur, dukungan beasiswa berupa keringanan pembayaran SPP bagi anak nasabah yang dianggap menonjol.

Kredit Sudara

Skim ini disalurkan melalui sebagian dari bank-bank tersebut diatas dan umumnya untuk para keluarga atau nasabah dengan kegiatan perdagangan di pasar, warung dan atau semacamnya. Bunga yang dibebankan kepada nasabah sama dengan bunga bank di pasaran biasa.

Kredit Mikro Sejahtera

Sskim ini akan disalurkan oleh Bank BNI sebagai bagian dari kredit Mikro yang akan menjadi andalan dari Bank BNI di cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gerakan Sadar Menabung

Bersama-sama dengan Himpunan Pandu dan Pramuka Werda (Hipprada) sedang dikembangkan pula Gerakan Sadar Menabung untuk para remaja dan anak-anak.

Disamping pelayanan Kedit PUNDI, Kredit Sudara dan Kredit Mikro Sejahtera tersebut, Yayasan Damandiri juga memberikan bantuan kepada anak-anak dan remaja anak keluarga kurang mampu berupa :

- Bantuan untuk SPP bagi siswa anak keluarga kurang mampu yang sedang berada pada kelas III SMU, SMK, atau Madrasah Aliyah (MA). Bantuan ini diberikan melalui sekolah-sekolah yang terpilih di tingkat kabupaten.
- Bantuan SPP untuk mahasiswa semester ke 7 atau ke 8 dari perguruan tinggi terpilih. Setiap tahun Yayasan Damandiri akan memilih sekitar 20 – 25 universitas negeri atau swasta dan kepada setiap universitas akan diambil 100 – 200 mahasiswa yang akan diberi bantuan untuk mendapatkan keringanan pembayaran SPP di perguruan tingginya.
- Bantuan Biaya Penelitian dan Penyelesaian Tesis dan atau Disertasi – bantuan ini akan diberikan kepada mahasiswa S2 dan mahasiswa S3 yang sedang dan akan menyelesaikan penelitian, penulisan Tesis dan atau Disertasi. Bantuan diberikan kepada mahasiswa yang mengambil topik-topik pemberdayaan sumber daya manusia, termasuk kesehatan reproduksi, reproduksi sejahtera, pengentasan kemiskinan, usaha mikro dan koperasi.
- Sedang dikembangkan pula bantuan penelitian dan pengembangan masalah yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha mikro atau kecil atau koperasi.

Disamping program-program tersebut diatas, Yayasan Damandiri juga membantu penayangan “aktor-aktor” pedesaan, yaitu para ibu dan remaja yang karena kegiatannya dalam pemberdayaan keluarga dan pengembangan ekonomi mikro berhasil diangkat dalam sinetron semi dokumenter setiap

minggu dalam acara TPI yang makin diminati penontonnya. Aktor-aktor lapangan, yang dianggap berhasil dalam mengembangkan upaya ekonomi mikro di desanya dikembangkan menjadi sinetron semi dokumenter yang ditayangkan oleh TPI setiap hari Minggu siang.

Program-program diatas menandai langkah sederhana yang telah atau yang akan disumbangkan sebagai bakti kepada masyarakat luas oleh Yayasan Damandiri, sekaligus dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan dan dorongan untuk usaha mikro secara mandiri.

D

MENYONGSONG HARI KELUARGA NASIONAL

Bangsa Indonesia setiap tahun akan memperingati suatu perhelatan besar bagi keluarga Indonesia dengan adanya Hari Keluarga Nasional. Peringatan tahun 2003 lalu. sungguh merupakan peringatan yang menyedihkan karena sebagian dari keluarga bangsa yang ada di Nangroe Aceh Darussalam sedang dicekam rasa takut. Mereka menghadapi aksi GAM yang melakukan pengrusakan dengan membabi buta. Karena rasa takut itu banyak keluarga yang terpaksa mengungsi. Di tempat pengungsian mereka dicekam rasa resah, takut bercampur harapan bahwa tempat tinggalnya segera aman, tenteram, penuh kedamaian dan bisa kembali normal seperti sediakala.

Rasa resah disertai harapan itu juga meliputi banyak kalangan di lingkungan BKKBN dan jajarannya yang terkait. Menurut rencana kantor BKKBN di daerah akan diserahkan secara resmi kepada Kepala Daerah di daerah tingkat II. Untuk itu banyak daerah yang telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah yang mengatur lembaga BKKBN daerah yang baru dalam berbagai bentuk. Ada yang tetap mempertahankan keutuhannya sebagai Dinas Keluarga Berencana, ada pula yang membentuk

Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan lain sebagainya.

BKKBN sendiri didirikan pada tahun 1970 untuk menampung suatu usaha menggerakkan masyarakat menangani masalah kependudukan yang sangat mengkawatirkan pada masa itu. Masalah yang menonjol pada tingkat pertama adalah masalah kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Karena tingkat kehamilan dan kelahiran yang tinggi, kesehatan para ibu yang mengandung dan melahirkan menjadi sangat rawan.

Banyak ibu meninggal dunia karena mengandung dan melahirkan pada usia yang sangat muda, mengandung dengan jarak yang sangat rapat, mengandung dan melahirkan pada usia yang tidak aman, tua atau diatas 30-35 tahun. Tingkat kesakitan dan kematian ibu karena mengandung dan melahirkan itu sangat tinggi, pada waktu itu masih berada pada angka sekitar 800 per 100.000 kelahiran.

Karena itu sasaran utama program KB yang segera dikembangkan pada waktu itu adalah mengusahakan agar para ibu yang subur, sering mengandung, atau kawin dan mengandung terlalu muda, atau masih juga pengin mengandung padahal usianya sudah agak lanjut, untuk mengetahui, sadar dan akhirnya bersedia tidak mengandung lagi dengan, kalau perlu, mempergunakan kontrasepsi atau alat KB yang disediakan oleh pemerintah. Program KB awal lebih banyak diperkenalkan di klinik dan rumah sakit kepada para pasangan subur, para ibu pasca persalinan, atau pasangan yang dianggap subur dan mempunyai kemungkinan mengandung dengan resiko tinggi.

Program KB lebih banyak dianggap kebanyakan orang sebagai program kesehatan reproduksi untuk pasangan yang dianggap subur agar

mereka bisa dibantu menghindari resiko kesakitan atau kematian. Mereka tidak boleh mati sia-sia karena tidak mengetahui resiko yang demikian dahsyat dari proses kehamilan dan kelahiran yang nampaknya seperti peristiwa yang biasa-biasa saja.

Program ini berlanjut terus sampai sekarang namun dengan gaya dan penampilan yang berbeda-beda. Untuk lebih memberi tekanan kepada pasangan subur muda yang diharapkan tidak mengandung terlalu muda, program KB diperkenalkan sebagai program untuk membantu anak-anak muda perempuan agar tidak menikah sebelum usia 20 tahun, atau kalau terpaksa menikah dibawah 20 tahun, diharapkan tidak mengandung dan melahirkan sebelum usia 20 tahun.

Untuk membantu pasangan tidak mengandung dan melahirkan terlalu sering, program KB diarahkan dengan sasaran utama pasangan "mupar", yaitu pasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan muda yang

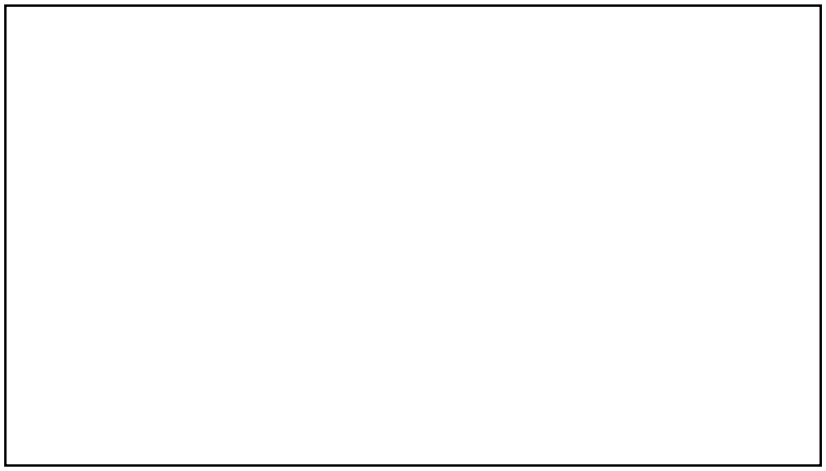

jumlah anaknya sedikit. Untuk mengajak pasangan dengan isteri yang usianya lebih dari 30-35 agar tidak ingin mengandung dan melahirkan lagi, diperkenalkan program dan pelayanan KB dengan metoda jangka panjang yang tidak merepotkan. Tujuannya adalah agar pasangan subur dalam usia senja tidak perlu sering-sering pergi ke klinik untuk mengambil jatah pil, kondom atau alat KB jangka pendek lainnya.

Kadang-kadang, terutama dari komentar para pengamat yang tidak mengerti bahasa untuk rakyat biasa yang umumnya masih buta huruf, BKKBN dianggap tidak menghargai hak-hak reproduksi pasangan usia subur itu. Padahal semua pasangan subur dengan pengetahuan yang sangat terbatas selalu mendapat pelayanan yang sangat sabar dan baik dari para dokter dan seluruh jajaran bidan dan pembantunya di seluruh pelosok tanah air.

Banyak pasangan yang ingin ber-KB tetapi menderita penyakit, pasangan itu tidak langsung diberi alat KB atau obat KB. Dengan penuh kesabaran pasangan itu diperiksa kesehatannya, diobati dengan baik dan gratis sampai penyakitnya sembuh.

Setelah makin banyak pasangan usia subur mengenal lebih mendalam tentang KB, barulah diperkenalkan program sayang ibu yang kemudian berkembang menjadi gerakan sayang ibu. Masalah reproduksi diperkenalkan dengan lebih langsung dan mendalam. Generasi muda diajak ikut serta mensukseskan KB tanpa kontrasepsi tetapi dengan menunda waktu kawin, belajar lebih baik, dan diajak lebih banyak melakukan kegiatan kemasyarakatan untuk persiapan masa depannya.

Program KB yang semula berkutat di klinik dan rumah sakit dan kebanyakan diurus para dokter dan bidan, diantarkan kepada pasangan usia

subur di desa atau rumah masing-masing keluarga sasaran. Petugas non klinik mulai ikut serta secara aktif. Setiap pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak perlu berdandan rapi karena pergi dari rumah atau desanya ke rumah sakit atau klinik.

Pelayanan KB berubah menjadi pelayanan menjemput bola di desanya. Pada perkembangan berikutnya pelaksanaannya makin banyak dilakukan oleh masyarakat desa sendiri. Program KB berubah menjadi gerakan masyarakat.

Lebih dari itu, dengan diawali dukungan UU nomor 10 tahun 1992, program KB dkikembangkan menjadi gerakan pembangunan keluarga sejahtera. Keluarga dijadikan titik sentral pembangunan. Keluarga dikembangkan menjadi wahana pembangunan bangsa. Selamat Hari Keluarga Nasional.

D

MERUBAH NASIB KELUARGA

Seperti peringatan hari besar lainnya, Peringatan Hari Keluarga Nasional 2004 disi dengan berbagai kegiatan. Pada umumnya para punggawa praja mengadakan upacara dengan isi pidato yang berkobar-kobar tentang perjuangan yang berhasil, tantangan yang dihadapi dan upaya lanjutan untuk menyelesaikan masalah. Bahan pidato yang biasanya disusun berjenjang itu sangat dipahami oleh para penyusunnya dan mengandung hal-hal yang sudah ditangani dan penyesalan karena banyak hal tidak bisa atau belum bisa diselesaikan.

Melalui konsep pidato yang dikirim secara berjenjang itu para penyusun biasanya menyisipkan pesan internal untuk dibaca oleh pimpinannya dengan menonjolkan masalah untuk menjadi perhatian . Bahan-bahan itu ada kalanya merupakan kritik internal, ada kalanya merupakan kritik kepada Departemen atau instansi lain. Ada kalanya bahan semacam itu sengaja dimasukkan bukan untuk diucapkan, tetapi sekedar mengingatkan pimpinan akan hal-hal yang belum sempurna. Ada kalanya merupakan kambing hitam karena jajaran dan staf yang

bersangkutan tidak dapat menyelesaikan masalah karena adanya hambatan tersebut.

Bahan-bahan semacam itu, kalau dicermati dapat dikembangkan menjadi langkah-langkah baru yang bisa membantu instansi yang bersangkutan atau masyarakat banyak mencari solusi masalah aktual yang dihadapinya. Namun, biasanya, setelah tersusun rapi dan diucapkan, biasanya pidato itu tidak seluruhnya dibaca lagi, apalagi dilaksanakan. Kecuali kalau pimpinannya secara sadar komit terhadap apa yang dibacanya.

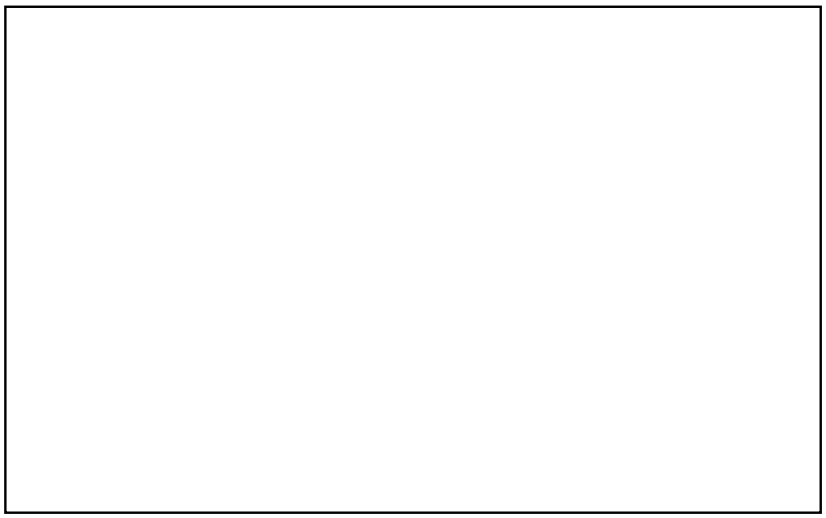

Oleh karena itu, dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ada baiknya kita sarankan dan kita renungkan secara sungguh-sungguh kemungkinan ditumbuhkannya strategi baru yang bisa mengembangkan dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang bisa membantu prakarsa gemilang yang berasal dari masyarakat sendiri. Dukungan itu tidak perlu

muluk-muluk, tetapi sederhana dan tidak mengganggu ide-ide dasar yang biasanya juga sederhana dan berasal dari masyarakat luas di pedesaan.

Unsur-unsur strategi yang mucul secara spontan dari masyarakat, kalau direnung dan disusun dalam suatu susunan yang rapih bisa jadi menjadi strategi dengan program dan kegiatan yang dengan mudah dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Unsur-unsur yang datang dari masyarakat itu biasanya sederhana dan tidak muluk-muluk, sehingga kalau diberikan kepercayaan yang didukung oleh komitmen yang tinggi kepada masyarakat, bisa jadi pelaksanaannya menjadi sangat subur dan berhasil dengan baik. Apalagi kalau masyarakat diberikan penghargaan yang wajar atas keberhasilannya melaksanakan strategi yang mereka sendiri memberikan masukan yang terbanyak.

Kemudahan lain adalah bahwa program atau 'proyek' semacam itu, karena banyak unsurnya datang dari masyarakat, tidak memerlukan anggaran yang besar. Bahkan, 'anggaran' itu tidak harus tergantung pada tahun anggaran, tetapi mengalir wajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat mengembangkan alokasi sesuai dengan aspirasi dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan.

'Proyek-proyek' yang dikembangkan bisa menjadi proyek-proyek yang harga sosialnya sangat tinggi karena diciptakan oleh masyarakat sendiri. Dipelihara oleh masyarakat luas. Bahkan bisa berkembang menjadi kebanggaan masyarakat dan dijadikan semacam simbul dari persatuan dan kesatuan masyarakatnya.

Untuk itu diperlukan para pemimpin yang merakyat yang sanggup menjadi suri tauladan dan mampu memberi semangat pembangunan yang

berorientasi keluarga. Pembangunan dengan orientasi keluarga itu akan merangsang pembangunan sumber daya manusia melalui advokasi yang gencar yang merangsang partisipasi masyarakat yang tinggi.

Dalam hal ini, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Ibu Rini Sutiyoso, pantas diacungi jempol. Sejak masa jabatan yang pertama, Ibu Rini Sutiyoso selalu segar dengan program-program yang memberi dukungan untuk pemberdayaan keluarga. Untuk mendukung program tersebut diadakan pertemuan untuk membahas bagaimana meningkatkan kemampuan wirausaha ibu-ibu anggota PKK DKI Jakarta di seluruh pelosok Jakarta.

Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan anggota pengurus lainnya sadar bahwa biarpun DKI Jakarta menempati urutan tertinggi dalam *Human Development Index*, tetapi masih banyak ibu-ibu anggota keluarga yang hidupnya kurang sejahtera dan harus banting tulang untuk membantu kebutuhan keluarga. Suami saja yang bekerja atau mempunyai usaha produktif dianggap tidak cukup untuk membiayai kehidupan yang maha dahsyat di Jakarta. Oleh karena itu usaha PKK untuk membantu meningkatkan kemampuan dan kesempatan usaha bagi para ibu anggotanya pantas diacungi jempol.

Usaha PKK itu ditopang dengan dukungan dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah dan Bank yang ada di DKI Jakarta, sehingga perhatian dan kesempatan pelatihan dan pendampingan yang digagas oleh PKK DKI Jakarta sungguh sangat tepat. Dengan pelatihan dan pendampingan diharapkan para ibu akan mampu mengembangkan usaha mikro dan kecil yang berbobot dan disukai oleh konsumen yang ada di sekitar kampung halamannya. Tidak mustahil, karena pasar luas yang terbuka

di DKI Jakarta, usaha mikro itu bisa bergabung dalam koperasi dan memasok usaha-usaha perdagangan lain yang lebih besar.

Apabila makin banyak ibu-ibu, terutama apabila usaha produktif itu diikuti oleh pasangan muda, diharapkan mereka akan menempatkan diri sebagai sumber daya manusia yang berguna. Selain itu mereka akan menerima norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, sehingga gerakan KB menjadi makin mandiri.

Gerakan KB yang mandiri ini akan dan harus menjadi warna baru dari peringatan Hari Keluarga Nasional 2004 yang akan dipusatkan di Balikpapan minggu depan. Selanjutnya diharapkan peringatan itu akan merangsang gerakan mandiri itu untuk memungkinkan pemilihan pelayanan dan alat kontrasepsi secara demokratis.

Pelayanan demokratis itu akan sangat dihargai oleh ibu-ibu yang sibuk dengan usaha ekonomi produktif karena yang memihan bukan lagi petugas KB atau petugas Dinas Kesehatan, tetapi oleh para ibu sendiri-sendiri. Dengan demikian rintisan dukungan PKK yang diambil oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta bersambung dengan kesempatan ber-KB secara mandiri.

D

KELUARGA MANDIRI PERLU TERUS BERKIBAR

Peringatan Hari Keluarga Nasional 2003 lalu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena peringatan kali ini akan dilakukan oleh keluarga yang struktur dan kemampuannya lain dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang ikut mencetuskan Hari Keluarga Nasional pada tahun 1993. Pencetusan Hari Keluarga di tahun 1993 disponsori sebagian besar oleh para peserta KB yang sangat berhasil dan bangga bisa ikut mengatur jumlah anak-anaknya. Jumlah anak yang sebelumnya rata-rata 6 orang, telah berhasil diturunkan dibawah angka 3 anak. Setelah sanggup menurunkan jumlah kehamilan dan anak, mereka sepakat, dengan dukungan UU nomor 10 tahun 1992, untuk melanjutkan pembangunan keluarga sejahtera.

Pembangunan keluarga sejahtera adalah pemberdayaan keluarga secara holistik, terpadu dan berkelanjutan. Pembangunan itu dilakukan dengan menempatkan keluarga sebagai titik sentral pembangunan. Keluarga, terutama keluarga yang tertinggal karena sesuatu alasan, dibantu mengembangkan seluruh fungsi keluarga yang dianggap

lemah. Keluarga yang sudah mampu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dirinya secara mandiri.

Delapan fungsi keluarga yang utama seperti disebutkan dalam UU nomor 10 tahun 1992, yaitu fungsi keagamaan, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan lingkungan mendapat perhatian yang seksama.

Mendahului Konperensi Kependudukan Dunia di Kairo tahun 1994, UU nomor 10 tahun 1992, atau UU Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera itu merubah program dan kegiatan koordinasi BKKBN. Lembaga ini, biarpun aturan yang menjadi dasar geraknya tidak diubah, tetapi program dan kegiatannya disesuaikan dengan amanat UU secara bertahap.

Perhatian pemberdayaan keluarga mulai dilakukan secara intensif, tidak saja pada usaha mengajak pasangan usia subur untuk mengikuti KB dalam arti pengaturan kelahiran, yaitu mengenal dan memakai kontrasepsi, tetapi juga memperkenalkan keluarga untuk menghidupkan seluruh fungsi keluarganya.

Kita masih ingat bahwa anak-anak balita dirangsang untuk lebih menghayati agamanya. Ibu-ibu yang sudah beribadah dengan baik diajak untuk mempersiapkan diri menjadi guru agama bagi anak-anaknya sendiri. Presiden dan Wakil Presiden menyediakan waktu untuk memberi semangat ibu-ibu yang belajar menjadi guru agama bagi anak-anaknya sendiri itu.

Para orang tua diajak untuk saling akrab dengan mengenal sesamanya,

makin iman dan taqwa, serta mencintai tanah airnya. Untuk itu, dalam suatu kesempatan memperingati Hari Keluarga Nasional, Presiden memutuskan untuk menetapkan hari Sabtu dan hari Minggu sebagai hari libur. Maksudnya tidak lain adalah agar para orang tua bisa mempunyai waktu yang cukup untuk berkumpul dengan seluruh anggota keluarganya, anak-anak dan anggota lainnya.

Mereka bisa makin akrab, mendalami keagamaan bersama-sama, dan menjalin silaturahmi dengan keluarga lain demi kesejukan dan kedamaian. Masyarakat kota bisa mengenal desa dengan berkunjung ke desa. Sebaliknya masyarakat desa bisa mendapatkan luberan kemakmuran dan makin akrab dengan keluarga perkotaan, meniru yang baik, mengambil manfaat dari sifat modernitas tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang dihayatinya dengan penuh kedamaian.

Produk-produk desa bisa laku jual sehingga tanpa kampanye gembar gembor akhirnya masyarakat Indonesia bisa mencintai produk dan makanan dari tanah airnya sendiri. Dengan demikian ekonomi pedesaan akan bertambah marak dan kemakmuran akan makin merata.

Keluarga pedesaan yang karena dukungan pelayanan KB yang sangat intensif di pedesaan telah berhasil mengikuti norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, menjadi tidak terlalu sibuk dengan anak-anak yang banyak. Demikian juga bidang pertanian makin menganut pendekatan industri pertanian yang intensif dan tidak lagi padat tenaga.

Kegiatan perdagangan dan industri kecil dan menengah mulai dibangun di pedesaan. Karena kualitas sumber daya manusia boleh dikatakan belum berubah, maka hasil produksi masyarakat desa baru laku jual secara lokal. Karena itu libur Sabtu dan Minggu bisa menjadi sarana untuk saling tukar pengetahuan dan sekaligus membangun gerakan Bangga Suka Desa, mencintai hasil produk masyarakat desa, membelinya, serta menyarankan peningkatan mutu dan variasi produksinya.

Kebiasaan dan mode baru mulai dibangun. Kegotong royongan ditegakkan sehingga perpaduan antara masyarakat kota dan masyarakat desa makin menjadi masyarakat Indonesia yang bersatu dan menghasilkan kekuatan baru yang maha dahsyat. Kekuatan baru itulah yang kemudian menghasilkan kekuatan insani yang bermutu dan bersatu. Keluarga menjadi wahana pembangunan bangsa.

Hari Keluarga Nasional itu ikut memberi rangsangan kenapa pemberdayaan keluarga bisa menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Pada tahun 1993 dimulai apa yang kemudian terkenal menjadi

Inpres Desa Tertinggal atau IDT yang mengatur upaya untuk membantu pengentasan kemiskinan di desa-desa tertinggal. Di desa yang tidak tertinggal diperkenalkan progam pemberdayaan keluarga dengan anjuran menabung dan belajar mengembangkan usaha ekonomi produktif secara berkelompok.

Keluarga Indonesia juga berubah, menjadi keluarga urban dengan pola hidup yang makin bervariasi. Usia harapan hidup makin tinggi. Partisipasi dalam kegiatan dan lapangan usaha juga tinggi. Pendapatan bertambah. Menu makanan berubah karena makin banyak keluarga yang bisa menikmati makanan yang semula tidak terjangkau.

Tetapi penyakitnyapun bertambah canggih. Penyakit biasa seperti pilek dan lainnya menghilang. Penyakit kelebihan kolesterol, darah tinggi, dan lainnya mulai menyerang. Serangan stroke yang biasanya terjadi pada penduduk lansia bisa juga mengenai penduduk usia muda.

Dengan dukungan UU nomor 10 tahun 1992, keluarga sejahtera harus tetap dikembangkan. Mereka harus dibekali dengan pengetahuan baru untuk membina kehidupannya yang serba baru dan modern. Keluarga tetap harus menjadi titik sentral pembangunan. Selamat Hari Keluarga Nasional.

D

MEMBANGUN SINERGY PEMBERDAYAAN KELUARGA

Di tahun 1970-an, dalam program pemberdayaan keluarga melalui gerakan KB Nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta pernah dibayangkan bakal menjadi daerah yang sulit dan lamban. Salah satu alasannya adalah karena daerah ini dianggap sebagai daerah yang mempunyai ciri tradisional yang kokoh, tidak akan mudah menerima perubahan, dan bakal segera tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya.

Tetapi ternyata dugaan itu meleset. DI Yogyakarta tampil tegar dan dengan kecepatan yang luar biasa segera mengadopsi tatanan keluarga yang baru dengan kesertaan KB yang sangat tinggi. Hasilnya kualitas keluarga maju pesat dan sekarang mempunyai nilai Human Development Index (HDI) yang tergolong tertinggi di tanah air.

Kecepatan adopsi dan penyesuaian dengan tata nilai baru itu antara lain adalah karena komitmen politik yang sangat tinggi dari pimpinan daerah, alim ulama, pimpinan formal dan pimpinan informal pada tingkat desa dan kampung, pelayanan kontrasepsi yang lancar dan segera diambil alih oleh masyarakat secara mandiri.

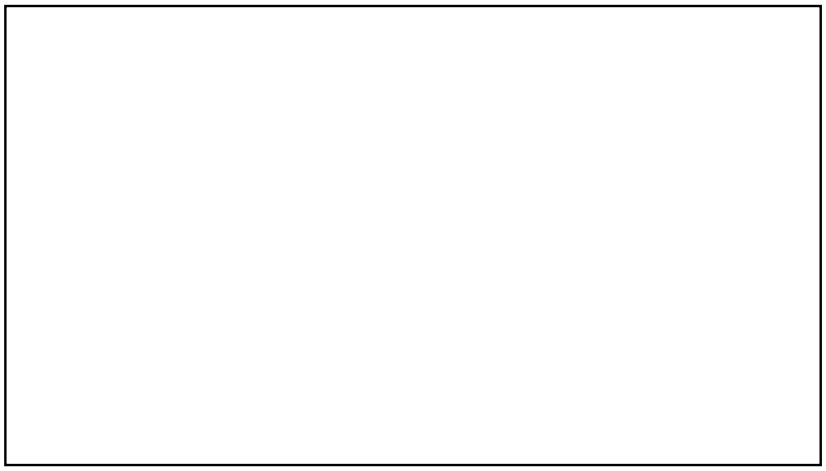

Masyarakat yang relatif sangat sederhana di pedesaan segera menterjemahkan istilah-istilah ilmiah medis dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Istilah-istilah demografi yang rumit juga disalin menjadi bahasa sehari-hari yang oleh anak kecilpun dianggap lelucon tetapi justru menjadi sangat populer.

Kesederhanaan itu diikuti oleh para alim ulama yang dengan bahasa agama berhasil menyakinkan banyak pihak akan manfaat dari program pemberdayaan keluarga yang dimulai dengan program KB. Kemudian program ini dilengkapi dengan perhatian yang tinggi terhadap ibu hamil dan melahirkan, perhatian yang tinggi terhadap anak balita, serta perhatian yang tinggi pula terhadap kemampuan orang tua, terutama para ibu yang menjadikan dirinya 'guru ngaji' bagi anak-anaknya. Propinsi DI Yogyakarta adalah sumber dari berkembangnya metoda membaca dan memahami huruf Arab dengan sistem 'Iqro, yang dipimpin oleh almarhum KH Humam, pencipta metoda ini yang genius.

Pendekatan medis, demografis, agamis dan sosial kemasyarakatan yang rapi dan dinamis menyebabkan masyarakat Yogyakarta berbeda dengan masyarakat dari propinsi lainnya. Kesertaan KB berkembang dengan penggunaan kontrasepsi yang sangat efektif. Penggunaan kontrasepsi bukan sekedar untuk program KB tetapi sebagai sarana mencapai kesempurnaan keluarga, lahir dan batin.

Masyarakat Yogyakarta yang membangun keluarga kemudian dianggap sebagai contoh yang baik, tidak saja untuk saudaranya di tanah air, tetapi menjadi guru teladan dari para pejuang pemberdayaan keluarga dari berbagai negara sahabat yang berbondong-bondong datang dan belajar ke Indonesia.

Kelengkapan pemberdayaan keluarga mulai dari bidang kesehatan, KB, pendidikan dan usaha ekonomi dilengkapi dengan dukungan pengusaan keagamaan menjadikan program KB Yogyakarta sebagai proses pemberdayaan yang utuh dan paripurna. Akibatnya nilai Human Development Index (HDI) untuk penduduk Yogya melejit menyalip nilai HDI penduduk dari daerah-daerah lain di Indonesia.

Gubernur, Wakil Gubernur dan para pejabat teras dari DI Yogyakarta berulang kali menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proses pemberdayaan dan peningkatan mutu sumber daya manusia yang telah melaju itu. Besok pagi, suatu pertemuan antar komponen pembangunan dan pemberdayaan keluarga akan digelar di Yogyakarta. Pertemuan itu akan berusaha mengembangkan sinergy dari berbagai komponen pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta untuk membantu masyarakat, terutama keluarga kurang mampu, mengembangkan kemampuan untuk bisa mengangkat dirinya secara mandiri.

Komponen-komponen pokok dalam bidang kesehatan akan diusahakan bisa tetap menyebar dan bisa diakses dengan mudah oleh penduduk pedesaan, keluarga kurang mampu, dan seluruh anggotanya. Anak-anak muda dan remaja diharapkan akan menempatkan pendidikan reproduksi sebagai bagian penting dari pengetahuan dasar yang harus dikuasai sehingga mereka bisa menyiapkan diri untuk tetap menghasilkan anak-anak keturunan masa depan yang bisa disiapkan untuk bersaing dalam alam globalisasi yang dahsyat di masa depan.

Kalau daerah lain sibuk dengan usaha melengkapi wajib belajar sembilan tahun, kiranya masyarakat Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar sudah lebih jauh bersiap melengkapi wajib belajar itu menjadi 12 tahun. Mereka mengharapkan daerahnya mempersiapkan anak-anak bangsanya untuk melengkapi pendidikannya sampai ke tingkat yang sangat tinggi, sehingga tidak ada lagi usaha mendapatkan ijazah palsu untuk menjadi caleg, dan lebih dari itu setiap remaja bisa memasuki perguruan tinggi yang tersebar sebagai jamur yang subur di daerahnya.

Para petinggi sepakat menggelar pendidikan dan pelatihan ketrampilan agar anak-anak keluarga kurang mampu yang *drop out* tidak bisa melanjutkan sekolah, dan anak tidak sekolah dapat mengikuti latihan ketrampilan. Anak-anak perempuan harus tidak lagi dibedakan dengan anak laki-laki untuk mendapatkan pemberdayaan dalam berbagai bidang. Mereka harus bisa menempatkan diri dan menjadikan perbedaan gender sebagai sejarah masa lalu yang makin menipis di daerahnya.

Dalam bidang potensi para ibu di desa-desa Yayasan Damandiri yang selama ini menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap upaya pemberdayaan sudah merambah pasar dan desa-desa dengan program

Pemberdayaan Usaha Mandiri (PUNDI) serta Warung SUDARA untuk menolong mereka yang siap melakukan usaha ekonomi. Banyak ibu-ibu di pasar telah menjadi nasabah bank setempat yang makin rajin menjemput bola di tempat produksi atau di tempat para ibu menggelar dagangannya.

Pertemuan di Yogyakarta besok pagi nampaknya akan menempatkan Propinsi DI Yogyakarta sekali lagi menjadi pelopor gerakan pemberdayaan keluarga yang makin paripurna, makin utuh, dan diharapkan menghasilkan manusia berkualitas yang sanggup menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan kesempatan. Semoga.

D

STRATEGI BARU PEMBERDAYAAN KELUARGA

BKKBN Pusat telah diadakan pertemuan untuk membahas hasil Survey Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2002-2003. Pembahasan itu bertepatan waktunya dengan *roadshow* yang diselenggarakan oleh Yayasan Damandiri, BKKBN, dan berbagai instansi, lembaga dan pihak swasta terkait untuk mengembangkan strategi baru pemberdayaan keluarga di Indonesia.

Roadshow itu sejauh ini telah diadakan di Propinsi Jawa Tengah di Purwokerto untuk kabupaten kota yang termasuk dalam wilayah pembangunan III dan di Magelang untuk kabupaten kota yang termasuk dalam wilayah pembangunan II. Disamping di Propinsi Jawa Tengah pertemuan semacam diadakan juga di Propinsi DI Yogyakarta. Selanjutnya pertemuan untuk maksud yang sama juga akan diadakan di Propinsi Jawa Timur dan Bali.

Pertemuan-pertemuan itu merupakan upaya untuk menampung kenyataan yang dihasilkan oleh SDKI 2003-2004 yang menyatakan bahwa tidak kurang dari 93 persen peserta KB sekarang ini telah membayar untuk pelayanannya. Ini berarti bahwa setidak-tidaknya ada sekitar 93 persen

peserta KB siap untuk mandiri.

Peserta mandiri itu harus dilayani dengan baik agar tetap lestari dan menghasilkan penurunan fertilitas yang lebih tinggi lagi. Kalau mereka tidak mendapat pelayanan paripurna yang berkulitas dan sempurna dikawatirkan mereka akan berhenti ber-KB dan kembali menghasilkan fertilitas yang tinggi seperti masa orang tuanya dulu.

Hasil penemuan lain yang menarik adalah bahwa tingkat fertilitas pasangan usia subur yang mempunyai tingkat pendidikan rendah lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih tinggi. Ini berarti bahwa pasangan usia subur dengan konsisi sosial ekonomi rendah mempunyai kecenderungan tidak mengikuti KB atau kalau mengikuti KB mereka mempergunakan alat kontrasepsi atau obat KB yang kurang efektif, atau menggunakannya secara tidak efektif.

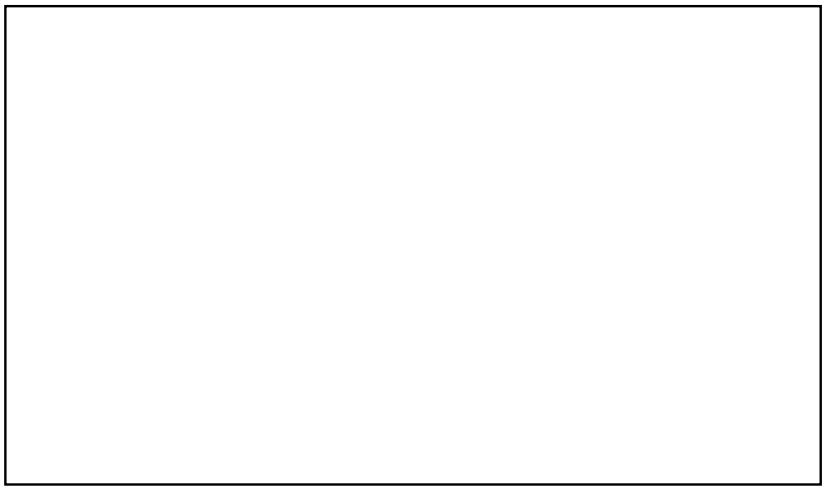

Keadaan ini sangat berbahaya karena pasangan usia subur yang kondisinya lemah itu hampir pasti akan menghasilkan anak-anak yang pemeliharaannya akan sangat minimal dan mungkin saja terlantar. Akibatnya pertumbuhan anak mereka akan terhambat dan bisa menghasilkan generasi yang tidak siap menghadapi globalisasi.

Penomena lain yang menarik adalah bahwa pasangan subur yang masih bisa mengantar penurunan yang signifikan pada waktu ini adalah dari kalangan pasangan muda. Pasangan muda kita, yang jumlahnya masih melimpah, dengan fasilitas dan dorongan yang kuat akan tantangan jamannya tetap berada di sekolah akan menunda perkawinan atau anaknya yang pertama.

Tingkat penundaan perkawinan itu cukup besar sehingga mengantar dan menahan tingkat fertilitas pada titik yang rendah. Keadaan ini sungguh sangat menguntungkan tetapi juga berbahaya. Kalau saja tingkat kemiskinan di tanah air tidak dapat dikendalikan, hampir pasti pasangan muda dan remaja Indonesia yang sementara ini sanggup bertahan untuk tidak segera menikah, akan terpaksa menikah untuk menyelamatkan diri dan membebaskan dirinya dari lilitan kemiskinan.

Akibatnya sudah sangat jelas, yaitu mereka akan segera mempunyai anak dan mengangkat fertilitas naik kembali. Kalau keadaan menjadi lebih buruk lagi, maka peningkatan fertilitas itu bisa saja diikuti oleh pasangan yang lebih tua, yang karena keadaan, akan menjadi penganggur. Dalam keadaan menganggur, pekerjaan yang bisa dan mudah dilakukan adalah mengandung dan mempunyai anak lagi.

Karena itu strategi jitu yang harus kita siapkan yaitu dengan

mengembangkan jaringan pelayanan reproduksi yang handal sampai ke tingkat pedesaan. Pasangan muda harus selalu diingatkan untuk tetap memelihara kesehatan reproduksinya demi masa depan yang lebih baik. Komponen-komponen pokok dalam bidang kesehatan reproduksi harus diusahakan menyebar dan bisa diakses dengan mudah oleh penduduk pedesaan, keluarga kurang mampu, dan seluruh anggotanya.

Disamping itu program KB harus dikaitkan secara erat dengan usaha melengkapi wajib belajar sembilan tahun menjadi wajib belajar 12 tahun. Anak-anak muda, terutama anak perempuan, harus makin lama berada di bangku sekolah, di bangku kuliah, sehingga menjadi insan yang paripurna.

Tingginya tingkat pendidikan atau lamanya kaum perempuan mengikuti pendidikan atau kursus akan memungkinkan anak-anak perempuan untuk bekerja di luar rumah dan menghasilkan pendapatan yang bisa memperbaiki kondisi keluarga. Peningkatan peranan perempuan itu dengan sendirinya akan mengubah kondisi kualitas penduduk yang rendah dan memungkinan para ibu untuk bisa memilih pengaturan kesehatan reproduksinya secara mandiri dan demokratis.

Dengan kemampuan pendidikan dan pilihan yang demokratis itu penggunaan kontrasepsi secara mandiri akan lebih mudah karena diikuti kemampuan ekonomi yang lebih baik. Begitu juga kebutuhan ber-KB akan sangat tinggi karena setiap perempuan harus keluar rumah untuk bekerja menghasilkan kesejahteraan untuk dirinya dan untuk seluruh keluarganya.

Perubahan-perubahan penomena demografis itu mengharuskan pendekatan komunikasi informasi dan edukasi yang berbeda dibandingkan dengan program KB di masa lalu. Pasangan usia subur dengan tingkat

pendidikan yang lebih tinggi sudah harus didekati dengan media massa yang profesional.

Sebaliknya pasangan dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih rendah harus diajak untuk bekerja keras dengan berbagai pendidikan, pelatihan, kursus dan pembukaan kesempatan kerja, terutama untuk kaum perempuan, agar pilihan ber-KB lebih demokratis dan lebih lestari.

Pertemuan di Yogyakarta dan di Jawa Tengah maupun di daerah-daerah lainnya adalah salah satu upaya untuk membawa nuansa baru ini menjadi komitmen para bupati dan walikota yang sekarang bertanggung jawab untuk memimpin gerakan KB nasional di Indonesia. Kalau komitmen dan dukungan operasional tetap tinggi, kita yakin hasil-hasil SDKI yang menggembirakan akan bisa tetap dipertahankan. Semoga.

D

MENYEGARKAN JARINGAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN

Dalam suasana Otonomi Daerah, untuk pertama kalinya Lembaga BKKBN, yang diserahkan kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta akhir tahun lalu, mengadakan Rapat Koordinasi Program KB tingkat propinsi daerah yang pertama kali. Dalam Rakorda yang dihadiri segenap jajaran dan mitra kerja lembaga daerah yang baru ini telah disajikan sebagai bahan masukan upaya penyegaran pemberdayaan keluarga, anak-anak dan remaja di DKI Jakarta.

Seperti diketahui, dalam berbagai ukuran nasional maupun internasional, DKI Jakarta menempati ranking yang pertama atau kedua di seluruh Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir ini *Human Development Index (HDI)* atau mutu sumber daya manusia di DKI Jakarta, baik dalam ukuran umum, atau ukuran gender*(Gender Development Index - GDI)*, menempati urutan pertama atau urutan kedua.

Kualitas manusia DKI Jakarta dalam ukuran HDI atau ukuran GDI itu , biarpun dalam ukuran internasional tergolong rendah, telah ditandai dengan usia harapan hidup yang relatif tinggi, ukuran lamanya pendidikan yang relatif memadai, dan tinggi rendahnya pendapatan atau kontribusi

pendapatan isteri kepada keluarganya.

Usia harapan hidup yang relatif tinggi itu biasanya hanya kalah dibandingkan dengan ukuran usia harapan hidup dari penduduk di DI Yogyakarta, yang biasanya lebih menonjol dibandingkan ukuran usia harapan hidup dari penduduk di propinsi lainnya.

Kadang-kadang saja ukuran *gender development index* juga kalah hanya karena para isteri dari keluarga-keluarga di DI Yogyakarta umumnya mempunyai kontribusi atau partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan umumnya para ibu di DKI Jakarta. Atau karena ibu-ibu di DKI Jakarta, yang sebenarnya bekerja di DKI Jakarta, tidak terhitung sebagai penduduk DKI Jakarta, tetapi tinggal dan terhitung sebagai penduduk di wilayah Jabotabek lainnya.

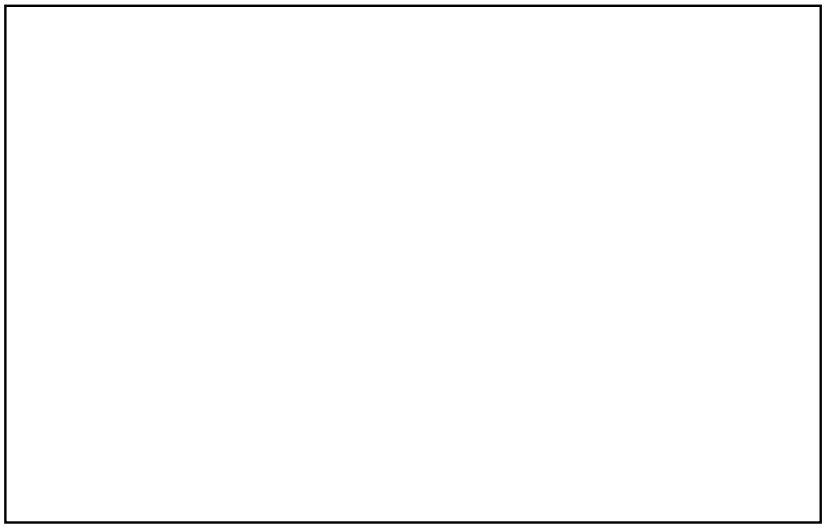

Kenyataan bahwa usia harapan hidup atau *expectation of life* dari penduduk dan masyarakat Jakarta umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan propinsi lainnya memerlukan perhatian yang seksama. Angka ini dipengaruhi oleh tinggi rendahnya usia kawin dan melahirkan penduduknya, tingkat kelahiran, tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan, tingkat kematian anak, yang umumnya sangat dipengaruhi oleh mutu dan penyebaran pelayanan kesehatan untuk ibu, anak dan remaja.

Karena itu, dalam kesempatan Rapat Koordinasi jajaran kependudukan dan KB di DKI Jakarta itu secara tepat telah dibahas upaya menyegarkan kembali jaringan pelayanan kesehatan dan KB di DKI Jakarta. Jaringan resmi tentunya adalah kualitas pelayanan oleh jajaran pemerintah seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Jaringan Rumah Sakit, dokter praktek swasta serta bidan praktek swasta.

Tidak kalah penting adalah peranan Jaringan Pelayanan Informasi dan Edukasi dari Jajaran PKK serta organisasi simpatisan lainnya. Jaringan pelayanan informasi dan edukasi, serta advokasi yang lebih dekat dengan masyarkarat dan organisasi pedesaan lainnya, akan memungkinkan pencegahan penyakit seperti demam berdarah dan penyakit lain yang mempunyai dampak pada peningkatan tingkat kematian yang tinggi.

Jaringan lain yang rupanya mendapat perhatian khusus, terutama karena kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang makin mengecil, adalah pelayanan oleh para bidan di pedesaan, RT dan RW. Lebih utama lagi adalah pelayanan secara mandiri.

Dalam hubungan ini Yayasan Indonesia Damai Sejahtera (Indra), bersama Yayasan Damandiri dan berbagai lembaga swasta lainnya, yang

selama ini selalu memberikan perhatian yang tinggi terhadap upaya pemberdayaan, secara khusus mengembangkan usaha baru di DKI Jakarta berupa pelayanan KB secara mandiri. Dalam skim ini, obat, alat dan fasilitas pelayanan KB Mandiri diperkenalkan dengan berbagai kemudahan.

Kepada para bidan diberikan kesempatan mendapatkan obat dan alat KB dengan harga yang relatif rendah, kesempatan pembayaran dengan cicilan, dan penyediaan yang dilakukan dengan sistem jemput bola. Harapannya adalah agar cakupan pelayalanan KB yang sudah tinggi tidak terganggu karena ketidak mampuan masyarakat mengakses pelayanan KB yang mudah dan murah seperti masa sebelumnya.

Dengan pengembangan jaringan ini diharapkan para akseptor yang relatif besar jumlahnya dan tersebar luas di DKI Jakarta serta kota-kota dan desa satelit lainnya dapat memperoleh pelayanan yang mudah diakses, murah dan bermutu. Bahkan diharapkan pengembangan pelayanan di DKI Jakarta itu bisa menjadi model yang mudah ditiru oleh daerah-daerah lainnya di luar DKI Jakarta. Karena sifatnya yang luas dan metropolitan, pelayanan di DKI Jakarta itu diharapkan dapat pula diakses oleh para peserta lain dari luar Jakarta yang kebetulan sedang berkunjung ke Jakarta untuk keperluan lain.

Prinsip pelayanan yang mandiri dan demokratis memberikan kesempatan para peserta dari luar kota metropolitan DKI Jakarta untuk dengan mudah mempergunakan pelayanan yang luas di DKI Jakarta. Kemudahan mengakses jaringan DKI Jakarta ini akan memungkinkan para akseptor KB benar-benar dapat mengakses pelayanan dengan mudah dan demokratis.

Itulah sebabnya langkah awal yang diambil pertengahan minggu lalu

oleh BKKBN DKI Jakarta, yang nampaknya sangat sederhana, bisa menjadi pemacu dan pemicu pelayanan KB dan Kesehatan yang lebih demokratis, dengan penyebaran yang luas, mudah diakses dan pelayanannya berorientasi pada kepuasan kliennya.

Langkah lain dalam penyegaran pelayanan pemberdayaan manusia di DKI Jakarta adalah sentuhan peningkatan mutu dan pengembangan prakarsa oleh anak-anak dan remaja di DKI Jakarta. Salah satu faktor penting dalam pengembangan nilai *HDI* adalah tingginya rata-rata sekolah anak-anak, atau lamanya setiap penduduk bersekolah, atau rendahnya tingkat buta aksara penduduknya.

Untuk merangsang anak-anak dan remaja agar bersekolah setinggi-tingginya tidak cukup dengan melihat kemampuan orang tua, tetapi juga kemampuan sekolah untuk menahan anak-anak dan remaja mencintai sekolahnya. Karena itu setiap sekolah harus bisa menawarkan pelajaran yang bermutu, memberi kesempatan anak didiknya untuk mengambil prakarsa dan mengembangkan hal-hal yang menarik dan membanggakan.

D

PERANAN KELUARGA DALAM PEMBERDAYAAN

Setiap tanggal 29 Juni 2004 lalu bangsa Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional. Peringatan yang sangat penting itu dipusatkan di Balikpapan dengan kehadiran Presiden RI, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang kebetulan seorang ibu. Akhir bulan lalu, para pemerhati dan simpatisan penggerak perempuan juga menyelenggarakan pertemuan di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Jakarta.

Pertemuan itu mempertanyakan keberhasilan upaya memperkuat keanggotaan perempuan dalam legislatif melalui Pemilu 2004. Menurut pemaparan mBak Ani Sutjipto, seorang peneliti dari Cetro, proporsi perempuan di legislatif hanya mampu mencapai sekitar 11 persen, sebagai anggota DPD sekitar 20 persen dan pada legislatif di daerah sekitar 15 persen. Jumlah tersebut jauh dibawah target sasaran sebesar 30 persen yang selama ini dijadikan wacana perjuangan kaum perempuan.

Kedua peristiwa itu hubungannya sangat erat. Adalah sangat menarik kalau Peringatan Hari Keluarga Nasional 2004 bulan lalu dijadikan momentum yang penting untuk memberikan peran yang lebih berarti kepada

keluarga mengembangkan pemberdayaan perempuan mulai saat yang sangat dini dalam keluarganya. Komitmen itu disertai dengan upaya membangun kultur keluarga dengan tidak membedakan laki-laki dengan perempuan, suatu budaya baru *"laki-laki perempuan sama saja"*.

Karena kelemahan perempuan sudah lama terjadi, pengembangan budaya itu memerlukan langkah yang memihak. Setiap keluarga harus lebih menonjolkan anak perempuan. Anak-anak perempuan harus mendapat dukungan pemeliharaan kesehatan lebih *intens* secara dini, dukungan pendidikan yang kuat, dan kesempatan berperan mulai dalam lingkungan keluarga secara wajar.

Orang tua, dan saudara-saudaranya, harus secara sadar memberikan tempat yang terhormat kepada anak perempuan. Upaya ini akan memakan waktu lama agar budaya 'laki-laki perempuan sama saja' itu memberi dampak yang berarti pada pengembangan kehormatan dan penempatan perempuan pada posisi yang terhormat saat menginjak dewasa.

Biarpun peranan kaum perempuan sangat diperlukan di abad ke 21, dari gambaran yang terjadi dalam Pemilu yang lalu, kehadiran perempuan dalam berbagai lembaga legislatif, barangkali belum cukup memadai untuk memenangkan perjuangan mengolah UU yang menjamin perempuan secara terhormat. Masih diperlukan dukungan kekuatan kaum perempuan lain, dan laki-laki yang menaruh simpati kepada perjuangan itu, diluar jajaran legislatif.

Kekuatan yang ada di masyarakat masih harus digalang untuk memberikan dukungan kepada mereka yang sempat mendapat kepercayaan di legislatif maupun mereka yang berada dalam lingkungan eksekutif. Penggalangan seluruh kekuatan yang menaruh simpati terhadap perjuangan

untuk menempatkan perempuan secara terhormat sejajar dengan rekan-rekan lelaki masih sangat diperlukan.

Perjuangan di abad ke 21 yang mengalami kemajuan ilmu, dan tehnologi komunikasi dan digital yang sangat tinggi, dimana batas antar negara hampir tidak ada lagi menjadi bertambah sukar.

Biarpun suatu peristiwa kecil di suatu negara, bahkan di suatu daerah yang sangat kecil dan terpencil, dengan mudah dapat diikuti di negara lain secara instan dengan jelas, perjuangan kaum perempuan belum tentu dengan serta merta segera diikuti oleh khalayak ramai. Pesan-pesan apapun yang bentuk dan isinya dapat dikirimkan hampir kepada setiap individu dan keluarganya di rumah masing-masing secara langsung dan mengandung nilai-nilai perjuangan yang menempatkan perempuan secara terhormat, belum tentu dengan mudah diterima masyarakat. Bahkan tidak jarang pesan-pesan itu malah diramu untuk menyudutkan atau menempatkan perempuan

dalam posisi yang dipojokkan.

Pesan-pesan negatif yang bisa melanggar hak-hak azasi manusia dengan mudah bisa disampaikan dalam kemasan yang menarik sehingga keluarga Indonesia atau keluarga manapun menjadi ragu-ragu untuk melepaskan anak perempuannya mengambil persiapan untuk berperan seperti saudaranya kaum lelaki. Pesan-pesan yang langsung memasuki setiap rumah tangga tanpa hambatan biasanya justru bertentangan dengan syarat proses membudayakan pengertian laki-laki perempuan sama saja. Orang tua yang berbudaya, dengan melihat tayangan TV atau media lainnya akan tetap berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama.

Oleh karena itu, dalam rangka Hari Keluarga Nasional, harus dikembangkan tidak saja demokrasi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekelilingnya, tetapi juga harus digarap secara sungguh-sungguh peran keluarga dalam sosialisasi untuk menempatkan perempuan dalam posisi yang makin siap untuk mandiri, profesional dan berbudaya.

Upaya itu harus dilakukan tidak saja dengan memperhatikan kaum perempuan saja, tetapi pada tingkat keluarga dikembangkan kesadaran dan komitmen untuk menjadikan anak perempuan dan anak laki-laki sejajar dalam pemberdayaan yang didukung oleh budaya bangsa secara keseluruhan. Kalau hal ini tidak dikerjakan, hampir mustahil sampai kapanpun upaya untuk menempatkan perempuan dalam posisi terhormat dalam lingkungan legislatif, eksekutif dan kegiatan-kegiatan lainnya akan membawa hasil.

Ini berarti bahwa dengan proporsi perempuan yang relatif kecil dalam berbagai lembaga legislatif, strategi perjuangan kaum perempuan dan perjuangan untuk perempuan harus ditata ulang. Menjadi tanggung jawab

semua pihak untuk dengan komitmen politik yang tinggi memberikan dukungan yang kuat terhadap upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengantar dan mendukung kaum perempuan berjuang secara mandiri, demokratis dan berbudaya.

Tuntutan perjuangan yang mandiri harus disertai dengan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya kaum perempuan, mulai usia sangat dini, anak-anak dan remaja. Pemberdayaan itu harus didukung dengan pengembangan suasana dan lingkungan yang kondusif, demokratis transparan dan memihak masyarakat kurang mampu, yang biasanya menjadi mandul karena terjadinya perubahan sosial kemasyarakatan yang sangat dahsyat.

Paralel dengan usaha pemberdayaan masyarakat dan manusia itu, secara sadar perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh upaya menempatkan kehormatan pada harga diri manusia, khususnya kaum perempuan. Dengan demikian pemberdayaan itu menjadi sangat relevan dalam konteks hak-hak azasi manusia. Oleh karena itu perlu dikembangkan suasana penghargaan yang menjamin hal-hal sebagai berikut :

- Kebebasan dari diskriminasi – terutama dalam hubungan dengan jender, termasuk karena alasan ras, etnik, asal-usul kebangsaan atau agama;
- Kebebasan kaum perempuan untuk memenuhi kebutuhan untuk suatu kehidupan yang sejahtera;
- Kebebasan kaum perempuan untuk mengembangkan diri dengan potensi diri yang memadai;
- Kebebasan kaum perempuan dari rasa takut;
- Kebebasan kaum perempuan dari ketidakadilan;
- Kebebasan kaum perempuan untuk berpikir, berbicara serta berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan berorganisasi;

- Kebebasan kaum perempuan untuk bekerja yang wajar tanpa eksploitasi.

Dengan demikian secara operasional, pemberdayaan dan pengembangan manusia, khususnya dengan prioritas kaum perempuan, anak-anak dan remaja, adalah suatu proses yang memungkinkan setiap individu mampu memenuhi pilihannya dengan bijaksana karena sebagai manusia yang bermutu bisa berfungsi dan mempunyai kemampuan yang baik.

Karena itu pemberdayaan dan pengembangan kaum perempuan harus diterjemahkan sebagai upaya memperbaiki fungsi dan kemampuan manusia. Pengembangan dan pemberdayaan kaum perempuan mengantar setiap individu untuk bisa hidup lebih lama, lebih sehat, lebih profesional, lebih sejahtera dan terhormat.

Karena itu pengembangan dan pemberdayaan perempuan Indonesia, dalam konteks keluarga yang sejahtera, haruslah bertujuan untuk menciptakan kaum perempuan yang mandiri, demokratis dan berbudaya. Upaya ini pada intinya haruslah diantarkan melalui pemberdayaan dalam bidang kesehatan untuk hidup lebih sehat dan berumur panjang, pendidikan dan pembelajaran untuk membangunnya menjadi manusia yang profesional dan mampu mengembangkan prakarsa dan kesempatan kerja yang menguntungkan, peningkatan pendapatan untuk menjadi manusia mandiri agar bisa memperoleh pilihan demokratis yang berbudaya. Upaya-upaya itu harus diikuti dengan komitmen pengembangan suasana kondusif yang memberikan kesempatan pilihan secara adil dan terhormat.

Dengan pendekatan komprehensif itu pengembangan dan pemberdayaan kaum perempuan dalam lingkungan keluarga harus disikapi dengan komitmen membuka kesempatan berpartisipasi yang luas dalam

setiap kegiatan dalam lingkup keluarga. Dalam lingkup yang lebih luas, dalam kehidupan bermasyarakat, kesempatan itu harus terbuka dengan penerimaan yang lebih ikhlas, yang dengan sendirinya terjamin hak-hak azasi untuk bisa hidup dengan penuh prakarsa, produktif, bisa menikmati kehormatan pribadi serta diakui oleh masyarakatnya dalam kesejukan. Komitmen itu harus membuka kemungkinan pengembangan manusia, khususnya perempuan, sebagai suatu proses pemberdayaan dari manusia, untuk manusia dan oleh manusia yang berbudaya.

Dalam era otonomi daerah dewasa ini, dimana kepemimpinan dan perencanaan serta pengelolaan pembangunan menjadi sangat dekat dengan sasarannya, terbuka kesempatan mengembangkan kebijaksanaan pembangunan yang reformatif. Proses pembangunan yang desentralistik dengan menempatkan manusia dan keluarga sebagai titik sentral pembangunan akan mempercepat proses peningkatan mutu manusia Indonesia, khususnya kaum perempuan.

Penempatan manusia, utamanya perempuan, anak-anak dan remaja, sebagai titik sentral pembangunan memungkinkan suatu proses untuk sekaligus menempatkan manusia dan keluarga sebagai obyek yang dikembangkan menjadi subyek pembangunan. Penyempurnaan ini merupakan pendekatan manusiawi didasarkan atas pengertian dan paradigma pengembangan manusia dan hak-hak azasinya.

Dengan alasan-alasan diatas, jelas pada tingkat keluarga, perannya di masa depan, diperlukan komitmen pada visi, misi luhur dengan paradigma yang lebih jelas, dan segera diikuti dengan strategi mutakhir yang berorirentasi pada tingkah laku yang mudah diukur hasilnya dengan ukuran yang jelas. Strategi perubahan tingkah laku itu harus dilaksanakan secara efektif dengan fokus pada sasaran yang tepat dan secara spontan mengembangkan dirinya sendiri.

Lebih dari itu harus diperhitungkan dan dikembangkan lingkungan sosial politik, agama dan budaya yang kondusif, dengan merangsang makin mekarnya komitmen untuk makin mengalirnya dukungan sumber daya, dana dan pemenuhan kebutuhan lain secara obyektif dan memadai.

Strategi baru itu harus menyatukan kekuatan kaum perempuan secara luas. Kekuatan yang ada dalam lingkungan legislatif harus dirangsang dengan dukungan politik dari massa perempuan yang berprestasi di lingkungan masyarakat luas. Masyarakat perempuan tidak saja harus diberi kesempatan untuk berprestasi, tetapi setiap perempuan yang mempunyai kesempatan berperan, harus segera mendapat dukungan dari rekan-rekan dan semua simpatisannya yang ada, di eksekutif, di legialatif, dan dimana saja, yaitu rekan perempuan maupun rekan yang simpatik terhadap perjuangan kaum perempuan.

Oleh karena itu semua pejuang perempuan harus sepakat diperlukannya pemberdayaan perempuan sebagai suatu gerakan yang gegap gempita. Gerakan ini harus menempatkan sasaran utama yang pertama keluarga, dan kemudian remaja perempuan usia produktif, baik yang baru menikah maupun mereka yang siap akan menikah, dan berasal dari segala lapisan masyarakat yang sangat luas.

Harapannya adalah bahwa keberhasilannya bisa menjadi model, sekaligus berkembang menjadi penggerak yang dinamis dan mandiri. Sasaran ini haruslah diperlakukan tidak saja sebagai obyek tetapi mendapatkan dukungan pemberdayaan sebagai calon aktor penggerak yang dinamis. Hari Keluarga Nasional 2004 kiranya bisa menjadikan pemberdayaan keluarga sebagai komitmen politik yang mempunyai arti strategis. Selamat Hari Keluarga Nasional 2004.

D

MENJADIKAN HARI KELUARGA SEBAGAI MOMENTUM PEMBERDAYAAN KELUARGA KURANG MAMPU

Pada tanggal 22 Juni 1949 lalu, setelah melalui perjuangan yang berat dan tidak putus-putusnya, akhirnya Belanda secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Juni tahun itu juga dilaporkan bahwa seluruh keluarga yang berjuang dan bersembunyi di berbagai tempat, di gunung dan di pedesaan, telah kembali kepada keluarga masing-masing.

Sejak saat itu keluarga yang kehilangan banyak anggotanya karena ikut dalam perjuangan di desa-desa pengungsian, dan di gunung-gunung menyusun perang gerilya, mulai kembali ke kampung halamannya masing-masing dan menyusun keluarga yang sejahtera, berusaha mengganti anggota yang hilang. Pemuda yang lajang segera menikah dan para isteri mereka segera mengandung dan melahirkan anak.

Keluarga yang semula meninggalkan isteri mereka di kampung, segera berkumpul dan menata kehidupan baru. Mereka segera pula berusaha mengganti anggota yang hilang, mengandung dan melahirkan bayi baru. Keluarga baru atau keluarga lama itu menata kehidupan yang lebih normal.

Terbukti kemudian bahwa kecepatan penggantian anggota keluarga yang hilang itu berlangsung dengan tingkat dan jumlah kelahiran yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan *"baby boom"* yang cukup mengkawatirkan.

Pada pertengahan tahun 1950-an mulai disadari bahwa proses reproduksi tersebut, dengan kesadaran dan pelayanan kesehatan yang terbatas, mulai menunjukkan akibat yang berbahaya dan kurang menguntungkan. Tidak saja tingkat kelahiran tinggi, tetapi juga tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan sangat tinggi. Kondisi kesehatan dan keadaan perekonomian yang masih terbatas menyebabkan tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan yang tinggi diikuti pula dengan tingkat kematian anak dan balita yang tinggi.

Selanjutnya, biarpun pemerintah memberikan perhatian pada keadaan ibu hamil dan melahirkan serta nasib anak-anak balita dengan baik, tetapi upaya mengurangi tingkat kematian itu tidak mudah dan memerlukan pemikiran yang lebih komprehensif. Pada akhir tahun itu juga dikembangkan organisasi oleh para dokter ahli kandungan yang mengusulkan adanya perencanaan keluarga yang lebih sistematis demi kesehatan yang lebih baik. Pada tahun 1960-an perjuangan itu mulai menunjukkan hasilnya dengan dimulainya suatu pilot proyek tentang KB di DKI Jakarta yang didukung pemerintah daerah.

Komitmen pemerintah daerah itu kemudian menjadi alasan yang menarik campur tangan pemerintah pusat. Melalui suatu Seminar Nasional yang berhasil di tahun 1967 pemerintah pusat mulai menunjukkan perhatian dan komitmennya. Pada tahun 1969 Pejabat Presiden RI Bapak HM Soeharto ikut menanda tangani Deklarasi PBB yang menunjukkan keprihatinan terhadap masalah kependudukan, kesehatan para ibu dan anak-anak.

Komitmen internasional tersebut diikuti lebih nyata pada tahun 1970 dengan perhatian pemerintah pusat terhadap masalah kependudukan lebih maju lagi, yaitu pembentukan lembaga semi pemerintah untuk menangani masalah kependudukan dan keluarga berencana.

Pemerintah berharap bisa mengusahakan agar kekuatan penduduk yang besar bisa ditingkatkan kesehatan dan mutunya agar mampu memberi sumbangan yang berarti dalam mengisi kemerdekaan. Setiap penduduk tidak lagi diharapkan mengisi pembangunan secara seragam, tetapi setiap individu memberi sumbangan sesuai pilihannya.

Puncak perhatian pemerintah yang ditandai dengan diresmikannya Lembaga semi pemerintah dengan bentuk sebagai Lembaga Keluarga Berencana Nasional dan kemudian terkulminasi menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Kelahiran lembaga BKKBN menandai era baru pengembangan penduduk bermutu di Indonesia. Program dan kegiatan yang ditelorkan oleh lembaga tersebut mendapat dukungan komitmen yang kuat dari Kepala Negara disertai anggaran yang memadai.

Segera setelah itu program dilaksanakan dengan sistem pengembangan sasaran dan dukungan pemerintah di daerah secara bertahap. Pengembangan bertahap itu memperhatikan kepadatan penduduk dan kesiapan wilayah dan kemampuan pemerintah untuk memberikan dukungan yang memadai.

Dengan sistem tersebut pengalaman yang ada di daerah yang memulai lebih dahulu dapat dimanfaatkan di daerah baru tanpa gejolak yang berarti. Lebih-lebih lagi pelaksanaan itu dilakukan dengan pendekatan kemasyarakatan dengan mengikut sertakan semua kekuatan yang ada dalam

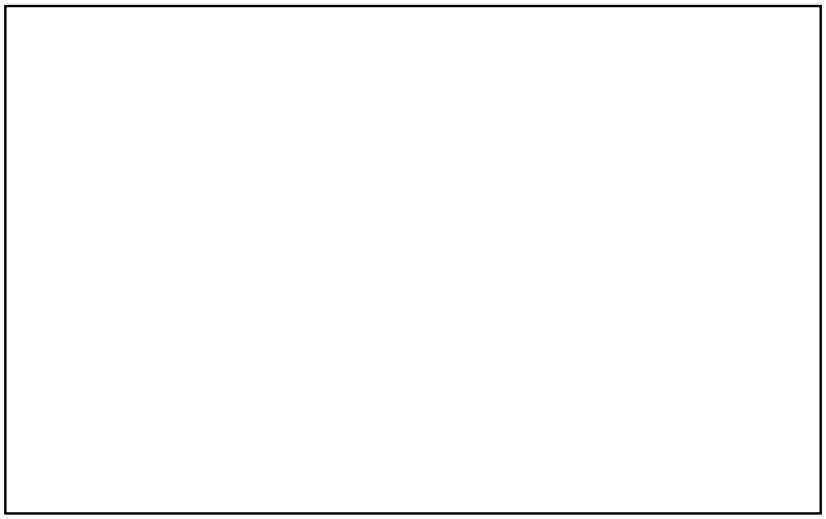

masyarakat. Pemimpin adat, alim ulama dan pemimpin kaum perempuan ikut serta secara aktif melaksanakan berbagai program dan kegiatan KB di berbagai wilayah.

Sementara itu jaringan lembaga swadaya masyarakat yang semula di dasarkan pada komitmen pemimpin yang peduli, diperluas dengan pendekatan partisipan dari berbagai wilayah. Partisipasi itu dimulai oleh para akseptor KB atau peserta KB yang dinamik dengan dukungan para pemimpin di tingkat lapangan, di pedesaan dan pedukuhan.

Kumpulan kelompok itu merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan basis wilayah pedesaan, berbeda dengan LSM yang biasanya mempunyai basis kota atau pusat pemerintahan. Kegiatan mereka berkembang dengan pesat dan menjadi kelompok akseptor yang kuat. Kemudian hari kelompok itu menjadi lembaga dengan program yang

komprehensif di tingkat pedesaan dan pedukuhan.

Dengan pendekatan partisipatif tersebut, keluarga sebagai anggota masyarakat yang ber-KB bertambah secara signifikan. Dukungan berbagai pihak mengalir dengan cukup meyakinkan dan jumlah serta proporsi peserta KB bertambah dengan cukup membesarkan hati. Dukungan program juga makin membesar, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pada tahun 1980-an program dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan kampanye yang membesar. Kampanye tersebut menghasilkan partisipasi yang makin tinggi. Disamping itu, kampanye ini juga menimbulkan akibat sampingan munculnya kesan adanya paksaan.

Dengan munculnya gerakan hak-hak azasi manusia, sistem target yang selama bertahun tahun dipergunakan untuk menjamin dukungan logistik akseptor KB, dan bersifat administratif, dituduh sebagai wujud program yang dipaksakan. Sistem dukungan itu dianggap sebagai mekanisme resmi untuk memaksa pasangan usia subur memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, yaitu dengan menggiring pasangan usia subur menjadi akseptor dengan paksa untuk memenuhi target.

Untuk menjawab tudingan tersebut dikembangkan strategi partisipatif yang lebih intensif. Di desa-desa dikembangkan kelompok akseptor yang kemudian menjadi kelompok keluarga sejahtera yang bertugas mendampingi para peserta KB mengetahui seluk beluk KB dan mengambil keputusan sendiri bagaimana mengembangkan kesertaan KB secara pribadi atau dalam kelompoknya. Pos-pos Pelayanan KB Desa juga dikembangkan untuk memudahkan peserta KB melayani diri sendiri menurut waktu dan pilihannya. Pos-pos itu kemudian berkembang menjadi Pos Pelayanan

Terpadu, atau Posyandu.

Pemerintah sendiri bersikap memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga strateginya dikembangkan menjadi strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang disebut *demand fullfilment.* Disamping itu mulai dikembangkan pendekatan perkotaan, perkenalan KB Lingkaran Biru, KB Lingkaran Emas dan pelayanan dokter dan bidan praktek swasta atau KB Mandiri yang memberi kesempatan kepada setiap pasangan usia subur untuk melakukan pilihan dengan lebih bebas menurut kemampuan dan kesempatan masing-masing.

Pendekatan yang lebih demokratis itu mengantar kesertaan KB yang makin luas dan demokratis. Dengan pendekatan tersebut seorang pasangan usia subur tidak diharuskan mendapatkan pelayanan KB di desanya, di kecamatannya, atau di kabupatennya. Pengukuran keberhasilan KB tidak tergantung pada *"daftar akseptor"* atau *"jumlah akseptor"* suatu daerah tetapi melalui penelitian ilmiah oleh Badan Pusat Statistik dengan pengawasan yang ketat dari berbagai lembaga internasional.

Dengan pendekatan baru dan pelayanan yang demokratis tersebut program dan kegiatan KB dan Kependudukan makin berkembang menjadi gerakan KB dan Kependudukan yang luas. Indonesia mendapat penghargaan yang tinggi dari segala penjuru dunia dan dijadikan salah satu negara yang dianggap pantas untuk ditiru dan diteladani. Indonesia menjadi salah satu pusat pendidikan dan pelatihan KB internasional dengan dukungan lembaga PBB dan komunitas donor dari berbagai negara maju.

Keberhasilan KB yang diiringi perkembangan globalisasi, keberhasilan program pendidikan yang cepat, dengan kemajuan modernisasi,

mengakibatkan tingkat pertumbuhan keluarga di Indonesia terus naik jauh lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan penduduk. Pada awal abad 21 jumlahnya mencapai sekitar 50-55 juta keluarga dan masih akan berkembang dengan kecepatan yang relatip tetap tinggi.

Perkembangan ini mengakibatkan ledakan angkatan kerja dan penduduk lanjut usia. Kalau dilihat dalam perspektif jangka panjang, jumlah penduduk lanjut usia mengalami *kenaikan sebesar 96 persen* selama *20 tahun*. Pada waktu yang sama *jumlah penduduk seluruh Indonesia* mengalami kenaikan hanya sebesar *42 persen*. Dengan demikian jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia *meningkat lebih dari dua seperempat kali lipat* dibandingkan kenaikan jumlah penduduk dalam waktu yang sama.

Pembangunan yang berhasil dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi pada umumnya itu, telah memungkinkan keluarga Indonesia melakukan pemeliharaan kesehatan dengan lebih baik. Biarpun belum sempurna, tetapi penyakit-penyakit degeneratif telah dapat diatasi. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, mereka umumnya bisa segera mendapat pengobatan, sehingga penyakit-penyakit yang apabila tidak ditangani bisa mengakibatkan komplikasi yang lebih rumit telah dapat diatasi.

Penduduk dewasa yang biasanya tidak mencapai umur yang relatif panjang karena gangguan kesehatan yang sederhana menjadi lebih mampu bertahan dan bisa menginjak usia yang lebih panjang. Namun kualitas kesehatan mereka sesungguhnya masih sangat rendah sehingga potensi penduduk lanjut usia tersebut belum bisa dianggap ideal dan mampu melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan.

Kejutan demografi berupa peningkatan jumlah dan proporsi penduduk usia kerja dan penduduk lansia tersebut belum seluruhnya mendapat perhatian masyarakat. Namun kita beruntung, pada tahun 1993 Presiden RI telah menetapkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga. Kiranya peringatan Hari Keluarga tahun 2005 dapat dijadikan momentum untuk memberikan perhatian yang lebih tinggi lagi pada pembangunan dengan menempatkan penduduk dan keluarga sebagai titik sentral pembangunan.

D D D

BAB VII

GERAKAN SOSIAL KEMANUSIAAN